



LAPORAN KINERJA TAHUN 2017

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MADIUN**

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun telah disusun dan diselesaikan sebagaimana mestinya. Hal ini tidak terlepas dari peran serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun yang telah bekerja sama dalam penyelesaian penyusunan Laporan Kinerja (LKj)

Laporan Kinerja (LKj) dimaksud, merupakan bentuk evaluasi untuk mengungkapkan keberhasilan ataupun menjelaskan kegagalan penyelenggaraan berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2017. Selain itu Laporan Kinerja (LKj) merupakan rangkaian proses penjabaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2014-2019 kedalam perencanaan sasaran, program dan kegiatan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan. Selanjutnya diharapkan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017 ini dapat digunakan sebagai media acuan terhadap pelaksanaan kinerja dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk tahun kedepannya

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait.

Madiun, 28 Pebruari 2018
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MADIUN
BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
BAMBANG SUBANTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19580906 199803 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
BAB II PERENCANAAN DAN KINERJA	5
A. Rencana Strategis	5
B. Visi	5
C. Misi	6
D. Tujuan Organisasi	6
E. Sasaran Organisasi	8
F. Indikator Kinerja Utama	9
G. Perjanjian Kinerja	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
A. Capaian kinerja Organisasi	11
B. Realisasi Anggaran	17
BAB IV PENUTUP	iv

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LKj) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun tahun 2017 merupakan bentuk evaluasi untuk menjelaskan keberhasilan atau kurang berhasilnya penyelenggaraan berbagai program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun 2017. Selain itu Laporan Kinerja (LKj) merupakan rangkaian proses akuntabilitas penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2014–2019 yang merupakan penjabaran visi, misi dan strategi pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

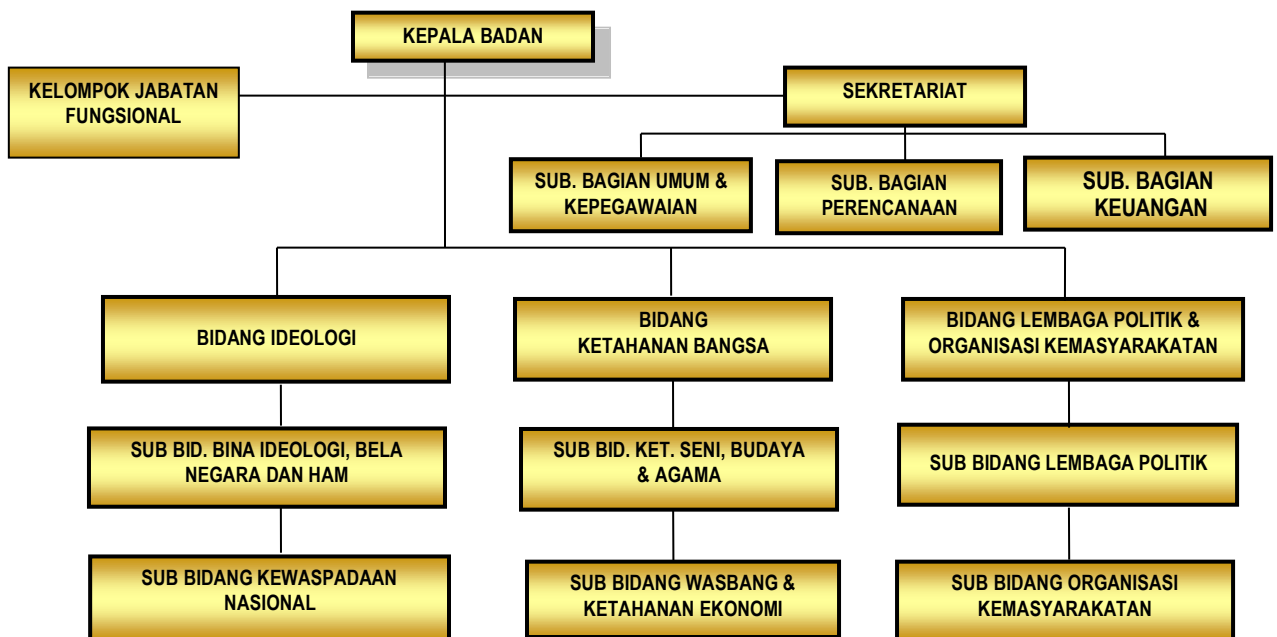
Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun Tahun 2017 berpedoman pada dokumen Renstra 2014-2019, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahun 2017, Pengukuran Kinerja Tahun 2017 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2017. SKPD berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) yang nantinya sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kota Madiun.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun merupakan unsur pelayanan pemerintah di bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, fasilitasi kegiatan politik dan ketahanan bangsa, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Madiun.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, organisasi yang melakukan pelayanan di bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, fasilitasi kegiatan politik dan ketahanan bangsa disebut sebagai Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Madiun. Namun setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah berubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun.

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun



Untuk menjalankan kewenangan sebagai unsur pendukung tugas Walikota di bidang kesatuan bangsa dan politik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang Peraturan Walikota Madiun Nomor Nomor 33 Tahun 2013 tersebut sebagai berikut :

Tugas Pokok : melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik

- Fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan untuk keberhasilan misi pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun yang teridentifikasi sebagai berikut :

1. Isu-isu Strategis

Berdasarkan UU Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang RI Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 01 tahun 2015 tentang penetapan PP pengganti UU nomor 01 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2018, dengan kondisi politik di tanah air yang tidak menentu menyebabkan masyarakat menjadi apatis dalam berpolitik dan masih terjadinya fluktuasi partisipasi masyarakat dalam politik untuk itu perlu memberikan pembelajaran dan pemahaman berpolitik, berdemokrasi kepada masyarakat yang selama ini hanya memilih untuk menjadi penonton dan tidak terlibat langsung dalam kegiatan politik, untuk itu di adakan kegiatan dalam bentuk Penyuluhan kepada masyarakat, agar masyarakat ikut berperan aktif dan terlibat langsung dalam Pemilu Kepala Daerah yang yang akan diadakan tahun depan, untuk mengurangi angka golput yang selama ini masih cukup tinggi dalam pelaksanaan pemilu

Lingkungan eksternal yang dapat berpengaruh tersebut adalah sebagai berikut :

a. Pengaruh Positif

1. Adanya sistem koordinasi dengan instansi/lembaga terkait baik horizontal maupun vertikal dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan;
2. Dalam kegiatan-kegiatan tertentu terdapat adanya supervisi dari Pemerintah propinsi dan atau Pemerintah pusat;
3. Adanya dukungan kemitraan dari warga masyarakat, khususnya Orkemas/LSM yang bergerak dalam bidang Politik, kewaspadaan bangsa dan ketahanan bangsa, terpeliharanya kerukunan umat beragama;

4. Adanya sistem koordinasi baik vertikal maupun horizontal dalam pelaksanaan tugas/kegiatan/penanganan masalah;
5. Adanya tugas-tugas/ urusan yang tidak ditangani oleh salah satu instansi di OPD namun mengharuskan untuk dilaksanakan.

b. Pengaruh Negatif

1. Lunturnya nilai-nilai dan semangat nasionalisme berupa rasa persaudaran, gotong royong dan kekeluargaan di dalam masyarakat, sehingga berpotensi terjadinya disharmonisasi dan perpecahan sosial ;
2. Pengaruh globalisasi yang mengarah pada sifat-sifat hedonisme dan konsumtif menjadikan masyarakat cenderung bergerak kearah sifat-sifat materialistis dan menyuburkan semangat kapitalisme dan egoism ;
3. Apatisme warga masyarakat dalam menggunakan hak-hak politiknya sebagai warga Negara ;
4. Dinamika penduduk yang tidak jelas arahnya sebagai akibat proses globalisasi menjadikan tidak menentunya kondisi keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan dan Strategis yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di daerah dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada atau mungkin timbul dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

B. Visi

Dalam rangka untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus dilandasi oleh Visi dan Misi yang merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah ke depan untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Kota Madiun. Maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah telah merumuskan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun.

VISI : "TERWUJUDNYA KESADARAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT YANG BERWAWASAN KEBANGSAAN MENUJU KOTA MADIUN YANG SEJAHTERA"

Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun tersebut di atas terdiri dari 2 (dua) pokok-pokok visi, yaitu :

- a. Berwawasan Kebangsaan dan Sejahtera
- b. Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Masing-masing pokok-pokok visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun Tahun 2014 – 2019 tersebut di atas dapat dijelaskan sebagaimana tertuang dalam tabel penyusunan penjelasan visi berikut ini :

Berwawasan kebangsaan dan sejahtera adalah mampu mewujudkan ketahanan ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya sehingga mampu mengembangkan diri menjadi masyarakat yang mandiri dan sejahtera di segala bidang kehidupan, dalam suasana yang kondusif.

Selanjutnya, misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun disusun sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut di atas. Rumusan misi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan menentukan langkah yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Kesadaran dan partisipasi masyarakat adalah masyarakat yang memiliki pemahaman dan kesadaran untuk secara aktif turut berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh, termasuk di dalamnya ikut berpartisipasi menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara dan ikut memelihara keamanan dan ketertiban lingkungan.

C. MISI

Didalam rangka untuk mencapai Visi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun menetapkan Misi sebagai berikut :

“ MEWUJUDKAN KETAHANAN BANGSA, IDEOLOGI DAN HAK ASASI MANUSIA SERTA KESADARAN BERPOLITIK BANGSA ”

D. TUJUAN ORGANISASI

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi atau orientasi atau sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Tujuan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang dikelompokkan untuk masing-masing bidang. Tujuan ditetapkan untuk memberikan arah terhadap pembangunan dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun. Dengan bertitik tolak pada arah Misi, tujuan dalam waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan misi yang dimaksud adalah mendukung dan menciptakan komunikasi tokoh antar umat beragama, menggali dan memantapkan kembali rasa cinta tanah air dan bangsa, kesadaran bela negara, seni dan budaya lokal dan Nasional dalam masyarakat, menyertakan petugas dan unsur masyarakat dalam pendidikan /penataran/pelatihan wasbang dan bela negara, baik di lingkup daerah, propinsi maupun di pusat (Nasional), tujuan yang hendak dicapai adalah :

1.1. **Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam masyarakat yang plural.**

2. Dalam melaksanakan misi yang dimaksud adalah Peningkatan peran dan pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan dan kehidupan politik serta perluasan sistem informasi politik pada warga masyarakat, mendorong tumbuh kembangnya nilai-nilai demokratis pada warga masyarakat, peningkatan peran dan kapasitas pengurus Parpol dalam sistem politik, mendukung pelaksanaan Pemilu yang aman, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dan peningkatan koordinasi dan komunikasi baik di daerah, dengan propinsi maupun dengan pemerintah pusat dalam persiapan, pelaksanaan maupun pasca pelaksanaan pemilu, tujuan yang hendak dicapai adalah :

2.1 **Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam kehidupan berpolitik yang harmonis, dinamis dan demokratis.**

3. Dalam melaksanakan misi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam deteksi dini dan cegah dini terhadap gangguan kamtibmas, meningkatkan koordinasi antar unsur penyelenggara kamtibmas dan meningkatkan kemampuan dan ketrampilan aparat intelijen, tujuan yang hendak dicapai adalah :

3.1. **Meningkatnya antisipasi terjadinya konflik untuk menciptakan rasa tentram, tertib dan aman di masyarakat**

E. SASARAN ORGANISASI

Sasaran merupakan penjabaran dari tiap-tiap tujuan yang telah ditetapkan dan merupakan hasil antara yang harus dicapai dalam rangka mencapai tujuan yang sebenarnya. Sasaran di sini dilaksanakan secara rutin dan atau berkelanjutan selama kurun waktu 5 tahun ke depan, yaitu dari 2014 - 2019, sasaran organisasi sesuai yang tertuang di dalam Renstra adalah :

- 1.1. Berdasarkan tujuan **"Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam masyarakat yang plural"** maka ditetapkan sasaran :

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja
1.1	Potensi konflik sosial yang terjadi di masyarakat	Prosentase Potensi konflik yang tidak terjadi

- 2.2. Berdasarkan tujuan **"Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam kehidupan berpolitik yang harmonis, dinamis dan demokratis"** maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja
2.2	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu	Prosentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu
		Prosentase Orkemas/LSM yang aktif

- 3.3. Berdasarkan tujuan **"Meningkatnya antisipasi terjadinya konflik untuk menciptakan rasa tentram, tertib dan aman di masyarakat"** maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja
3.3	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Prosentase Potensi gangguan kamtibmas yang tidak terjadi

Tabel 4.4. Target Tahunan Renstra (Reviu)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				
			2015 realisasi	2016 realisasi	2017 realisasi	2018	2019
1.	Potensi konflik sosial yang terjadi di masyarakat	Prosentase Potensi konflik yang tidak terjadi	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum	Prosentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu	-	-	-	75%	75%
		Prosentase Orkemas/LSM yang aktif	72%	65%	75,9%	72%	75%
3.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Prosentase Potensi gangguan kamtibmas yang tidak terjadi	100%	100%	100%	100%	100%

F. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka pengukuran keberhasilan serta pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5 /2007 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun menetapkan IKU dari sasaran adalah :

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SUMBER DATA
1	2	3	4
1	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu	- Prosentase pemilih yang menggunakan hak pilinya dalam Pemilu - Prosentase Ormas /LSM yang aktif	- Data jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya - Data Ormas, LSM yang terdaftar di Bakesbangpol
2	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	- Prosentase Potensi gangguan kamtibmas yang tidak terjadi	- Data laporan gangguan kamtibmas
3	Potensi konflik sosial yang terjadi di masyarakat	- Prosentase Potensi konflik yang tidak terjadi	- Data Peta Rawan Konflik

G. PERJANJIN KINERJA

Renstra 2014 – 2019 selanjutnya dijabarkan secara bertahap dalam rencana kinerja tahunan yang memuat target kinerja tahunan dari masing-masing indikator kinerja sasaran. Target yang telah disepakati beserta dengan kerangka pendanaan masing-masing program dan kegiatan yang mendukungnya, selanjutnya ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Besaran target kinerja yang ditetapkan untuk dicapai dalam tahun 2016 adalah sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MADIUN

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2017
1.	Potensi konflik sosial yang terjadi di masyarakat	Prosentase Potensi konflik yang tidak terjadi	100%
2.	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu	Prosentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu	-
		Prosentase Orkemas/LSM yang aktif	70%
3.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Prosentase Potensi gangguan kamtibmas yang tidak terjadi	100%

PROGRAM PENDUKUNG SASARAN KINERJA

No	Program	Anggaran (Rp.)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	298.424.000
2	Program pemeliharaan barang milik daerah	78.312.0.000
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	20.000.000
4	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	819.502.000
5	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1.642.052.000
6	Program Pendidikan Politik Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan	555.100.000
7	Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal	1.217.460.000
	J U M L A H	4.630.850.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak – pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Kinerja Tahun 2017 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan perhitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja. Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun yang telah ditetapkan. Selain untuk mengukur kinerja capaian tahun 2017 Indikator Kinerja Utama juga telah digunakan untuk menyusun perencanaan dan Perjanjian Kinerja tahun 2017

Untuk memberikan suatu penilaian atas capaian kinerja diperlukan nilai-nilai yang dijadikan sebagai acuan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja dengan memberikan atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja , yang dibedakan atas beberapa macam katagori yaitu :

Metode pengukuran dan penyimpulan yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Metode pengukuran capaian kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Metode penyimpulan capaian sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran.

Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Metode penyimpulan capaian sasaran

No.	Kriteria Pengukuran	Predikat
1	$X \geq 100 \%$	Sangat baik
2	$85 \% \leq X < 100 \%$	Baik
3	$60 \% < X < 85 \%$	Cukup Baik
4	$X \leq 60 \%$	Kurang Baik

3. Hasil Pengukuran dan Analisa Capaian Kinerja

Hasil pengukuran kinerja sasaran strategis dalam Penetapan Kinerja Tahun 2017 disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.1. Sasaran : Menurunnya konflik sosial yang terjadi di masyarakat

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian (%)	Predikat
1.	Potensi konflik sosial yang terjadi di masyarakat	Prosentase Potensi konflik yang tidak terjadi	100%	100%	100	Sangat Baik

Pada tabel diatas antara target dan realisasi dapat tercapai 100% dengan berpredikat **sangat baik**, diukur sebagaimana rumus berikut :

$$\frac{\text{Potensi konflik yang tidak terjadi} \times 100}{\text{Potensi konflik seluruhnya}} = \frac{24}{24} \times 100 = 100\%$$

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu :

Tabel 3.2. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1.	Potensi konflik sosial yang terjadi di masyarakat	Prosentase Potensi konflik yang tidak terjadi	100%	100%	100%

Dari tabel diatas capaian kinerja tahun 2017 dan tahun 2016 sudah sesuai dengan target dengan predikat sangat baik.

MEMBANDINGKAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 DENGAN CAPAIAN RENSTRA :

Tabel 3.3 Membandingkan Capaian Kinerja Tahun 2017 Dengan Capaian Renstra

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra 2017	Capaian Kinerja 2017	Nilai Kinerja (%)	Predikat
1.	Potensi konflik sosial yang terjadi di masyarakat	Prosentase Potensi konflik yang tidak terjadi	100%	100%	100	Sangat baik

Pada tabel diatas antara target Renstra dan Capaian Kinerja tercapai 100% dengan predikat **sangat baik**.

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
2. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

PENYEBAB KEBERHASILAN DAN PENINGKATAN KINERJA

Adanya Peta Rawan Konflik yaitu suatu kajian tentang wilayah rawan konflik di Kota Madiun. Hasil yang diharapkan dari Pemetaan rawan konflik adalah untuk mengantisipasi terjadinya potensi konflik sosial terutama memberikan gambaran dan pemetaan rawan konflik sosial di Kota Madiun, sehingga potensi konflik bisa terdeteksi dan tidak terjadi di Kota Madiun.

Tabel 3.4. Sasaran : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian (%)	Predikat
1.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum	Prosentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu	-	-	-	-
		Prosentase Orkemas/LSM yang aktif	70%	75,9%	108	Sangat baik

1. Pada tabel indikator pertama masih ada yang Nihil karena pada tahun 2017 tidak ada kegiatan Pemilu
2. Pada tabel indikator kedua capaian 108% dengan predikat **sangat baik**, diukur sebagaimana rumus berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Ormas/LSM yang aktif} \times 100}{\text{Jumlah Ormas/LSM seluruhnya}}$$

$$= \frac{120}{158} \times 100 = 75,9\%$$

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu :

Tabel 3.5 Membandingkan Capaian Kinerja Tahun 2017 Dengan Capaian Renstra

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum	Prosentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu	-	-	-
		Prosentase Orkemas/LSM yang aktif	72%	65%	75,9%

1. Tabel pertama Capaian Kinerja *Prosentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu*. Pada tahun 2017 tidak ada kegiatan Pemilu
2. Tabel kedua Capaian Kinerja *Prosentase Orkemas/LSM yang aktif* pada tahun 2017 apabila dibandingkan dengan tahun 2016 mengalami kenaikan

MEMBANDINGKAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 DENGAN CAPAIAN RENSTRA :

Tabel 3.6 Membandingkan Capaian Kinerja Tahun 2017 Dengan Capaian Renstra

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra 2017	Capaian Kinerja 2017	Nilai Kinerja (%)	Predikat
1.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum	Prosentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu	-	-	-	-
		Prosentase Orkemas/LSM yang aktif	70%	75,9%	108	Sangat baik

1. Pada tabel pertama indikator Prosentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2017 Nihil, Pemilu berlangsung lima tahun sekali karena kegiatan tersebut dilaksanakan pada waktu Pemilu dan pelaksanaan Pemilu Pada Tahun 2018, Pemilu Legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden pada Tahun 2019.
2. Pada tabel kedua antara target Renstra dan Capaian Kinerja mengalami kenaikan dengan predikat **sangat baik**,

PENYEBAB KEBERHASILAN DAN PENINGKATAN KINERJA

Dengan adanya Permendagri baru yang mengatur Pendaftaran, Pengelolaan, Pengawasan, kerjasama Kemendagri dengan Pemerintah Daerah dengan Lembaga Orkemas dan untuk memberikan informasi dan menyamakan persepsi kepada masyarakat tentang Orkemas untuk itu setiap tahun diadakan pembinaan kepada pengurus dan anggota LSM/Orkemas sebanyak 7 kali kegiatan dalam 1 tahun , Organisasi Kemasyarakatan di Kota Madiun tidak ada yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Tabel 3.7 Sasaran : Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian (%)	Predikat
1.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Prosentase Potensi gangguan kamtibmas yang tidak terjadi	100%	100%	100	Sangat Baik

Pada tabel diatas antara target dan realisasi dapat tercapai 100% dengan berpredikat **sangat baik**, diukur sebagaimana rumus berikut :

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Potensi gangguan kamtibmas yang tidak terjadi} \times 100}{\text{Potensi gangguan kamtibmas seluruhnya}} \\
 & = \frac{56}{56} \times 100 = 100\%
 \end{aligned}$$

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu :

Tabel 3.8 Membandingkan Capaian Kinerja Tahun 2017 Dengan Capaian Renstra

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Prosentase Potensi gangguan kamtibmas yang tidak terjadi	100%	100%	100%

Dari tabel diatas capaian kinerja tahun 2017 dan tahun 2016 sudah sesuai dengan target dengan predikat sangat baik.

MEMBANDINGKAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 DENGAN CAPAIAN RENSTRA :

Tabel 3.9 Membandingkan Capaian Kinerja Tahun 2017 Dengan Capaian Renstra

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra 2017	Capaian Kinerja 2017	Nilai Kinerja (%)	Predikat
1.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Prosentase Potensi gangguan kamtibmas yang tidak terjadi	100%	100%	100	Sangat baik

Pada tabel diatas antara target Renstra dan Capaian Kinerja tercapai 100% dengan predikat **sangat baik**.

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

1. Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal

PENYEBAB KEBERHASILAN DAN PENINGKATAN KINERJA

Kerjasama dan koordinasi yang baik antara unsur terkait penyelenggara Kamtibmas dalam hal pemantauan keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga tercipta Kota Madiun yang kondusif.

B. Realisasi Anggaran Tahun 2017

Tabel 3.10 Realisasi Anggaran Program Pendukung Tahun 2017

No.	Sasaran	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Program Pendukung	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	298.424.000	291.230.494	97,59
		Program pemeliharaan barang milik daerah	78.312.000	74.693.806	95,38
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	20.000.000	19.784.000	98,92
J U M L A H			396.736.000	385.708.300	97,22

Tabel 3.11 Realisasi Anggaran Program Prioritas Tahun 2017

No.	Sasaran	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Potensi konflik sosial yang terjadi di masyarakat	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	819.502.000	656.866.812	80,15
		Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1.642.052.000	1.353.401.350	82,42
			2.461.554.000	2.010.268.162	81,66
2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum	Program Pendidikan Politik Masyarakat dan Orkemas	555.100.000	538.684.050	97,04
3.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal	1.217.460.000	752.540.118	61,81
J U M L A H			4.234.114.000	3.301.492.330	80,29

Pengukuran efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja

Untuk memberikan suatu penilaian atas capaian kinerja diperlukan nilai nilai yang dijadikan sebagai acuan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja dengan memberikan atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja. Metode pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut :

Pengukuran efisiensi :

= Rata-rata Capaian Kinerja - Rata-rata penyerapan anggaran

Adapun efisiensi penggunaan anggaran pada upaya pencapaian sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik Kota Madiun pada Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 3.12 Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2017

No.	Sasaran	Capaian (%)		
		Kinerja	Anggaran	efisiensi
1.	Potensi konflik sosial yang terjadi di masyarakat	100	81,66	18,66
2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum	108	97,04	1,11
3.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	100	61,81	38,19

Penjelasan :

1. Capaian kinerja sasaran "Menurunnya konflik sosial yang terjadi di masyarakat" sebesar 100% didukung anggaran sebesar 81,66%, maka apabila dibandingkan tingkat capaian kinerja dengan penyerapan anggaran diketahui bahwa efisiensi penggunaan anggaran pada sasaran tersebut dapat terlaksana.
2. Capaian kinerja sasaran "Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum" sebesar 100%, sebesar 97,04%, maka apabila dibandingkan tingkat capaian kinerja dengan penyerapan anggaran diketahui bahwa efisiensi penggunaan anggaran pada sasaran tersebut dapat terlaksana.
3. Capaian kinerja sasaran "Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat" sebesar 100%, sebesar 61,81%, maka apabila dibandingkan tingkat capaian kinerja dengan penyerapan anggaran diketahui bahwa efisiensi penggunaan anggaran pada sasaran tersebut dapat terlaksana.

Dari tabel dan penghitungan diatas dapat dilihat bahwa 3 (tiga) sasaran capaian kinerjanya 100% maka diperoleh capaian kinerja yang efisiensi/baik.

Sehingga ditarik kesimpulan bahwa Sumber Daya Manusia yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun Tahun 2017 sudah efisiensi.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun Tahun 2017 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 sebagai pelaksanaan Laporan Kinerja yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian sasaran, tujuan dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun dalam upaya melaksanakan good governance. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan program yang ditetapkan.

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa tugas-tugas di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun telah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Namun demikian, upaya peningkatan masih terus dikerjakan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja (LKj) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun Tahun 2017 ini diharapkan dapat memberikan informasi-informasi seputar pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun secara umum dan dapat dijadikan acuan dalam merencanakan kegiatan pada tahun berikutnya, sehingga dapat dilakukan upaya perbaikan pelaksanaan dan kegiatan pada masa yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Madiun, 28 Februari 2018


BAMBANG SUBANTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19580906 199803 1 002

**PENGUKURAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MADIUN TAHUN 2017**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Potensi konflik sosial yang terjadi di masyarakat	Prosentase Potensi konflik yang tidak terjadi	%	100	100	100
2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum	Prosentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu	%	-	-	-
		Prosentase Orkemas/LSM yang aktif	%	70	75,9	108
3.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Prosentase Potensi gangguan kamtibmas yang tidak terjadi.	%	100	100	100

Madiun, Desember 2017
 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KOTA MADIUN

BAMBANG SUBANTO, SH
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19580906 199803 1 002



WALIKOTA MADIUN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **BAMBANG SUBANTO, SH.**
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.**
Jabatan : Walikota Madiun


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.

Madiun, Oktober 2017
Pihak Pertama,

BAMBANG SUBANTO, SH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19580906 199803 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MADIUN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Potensi konflik sosial yang terjadi di masyarakat	Prosentase Potensi konflik yang tidak terjadi	100%
2.	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu	Prosentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu	-
		Prosentase Orkemas / LSM yang aktif	70%
3.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Prosentase Potensi gangguan kamtibmas yang tidak terjadi	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 298.424.000	
2. Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Rp. 78.312.000	
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 20.000.000	
4. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rp. 819.502.000	
5. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rp. 1.642.052.000	
6. Program Pendidikan Politik Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 555.100.000	

7. Program Pemeliharaan Ketentraman dan Rp. 1.217.460.000
Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan
Tindak Kriminal

J U M L A H Rp. 4.630.850.000

Madiun, Oktober 2017


Walikota Madiun
H. SUGENG RISMIYANTO, S.H. M.Hum.


Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Madiun
BAMBANG SUBANTO, SH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19580906 199803 1 002